

Seni Grafiti Di Kalangan Mahasiswa: Ruang Ekspresi Perlawanan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Kampus

Astrella Felicia Mallisa

Departemen Antropologi, Universitas Hasanuddin

Correspondence author: astrellafelicia6@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Graffiti, Campus Policy, Resistance, Student, Solidarity.

How to cite:

Mallisa, A., F. (2025).
Seni Grafiti Di
Kalangan Mahasiswa:
Ruang Ekspresi
Perlawanan Mahasiswa
Terhadap Kebijakan
Kampus.

ABSTRACT

The phenomenon of graffiti art among university students in Makassar reflects a form of resistance to campus policies perceived as restricting freedom of expression. Graffiti has become an important medium through which students convey social criticism and articulate their aspirations, particularly when formal channels of dialogue are considered inadequate. This study therefore aims to analyze the motivations, meanings, and functions of graffiti as a form of everyday resistance within the framework of James C. Scott's theory. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation and in-depth interviews. The informants consisted of six students from three major universities in Makassar. The data were analyzed to identify emerging themes related to graffiti as a form of expression and resistance. The findings show that graffiti functions as a means of symbolic communication that enables students to express dissatisfaction with campus policies. Students' motivations for creating graffiti vary, ranging from the need to articulate personal concerns to the desire to represent collective voices. Solidarity among graffiti artists is also evident in the production process, as they support one another and collaborate in creating their works. Despite the risk of sanctions imposed by university authorities, graffiti remains a pragmatic and adaptive form of resistance, creating space for dialogue and protest that is not adequately represented in formal forums.

1. Pendahuluan

Seni merupakan sarana manusia untuk mengekspresikan emosi, gagasan, dan nilai budaya. Dalam masyarakat modern, salah satu bentuknya adalah grafiti, yakni ekspresi visual yang menggunakan dinding dan ruang publik sebagai medium. Grafiti telah berkembang dari coretan sederhana menjadi praktik artistik yang memuat identitas, komentar sosial, dan kritik politik. Walaupun sering diperdebatkan karena dianggap mengganggu ketertiban atau merusak fasilitas, grafiti juga menciptakan dialog antara pembuat, masyarakat, dan pemegang kekuasaan.

Karena hadir di ruang yang dapat dilihat bersama, grafiti memberi kesempatan kepada kelompok yang tidak memperoleh ruang dalam saluran formal untuk menyampaikan pengalaman dan ketidakpuasan mereka (Aulia et al., 2023). Sebagai bagian dari subkultur perkotaan, grafiti tidak hanya berfungsi sebagai karya visual, tetapi juga sebagai cara merebut ruang dan membangun identitas. Setem et al. (2011) menunjukkan bahwa subkultur seni rupa membentuk identitas budaya melalui kerangka ideologis yang berbeda dari norma dominan. Dalam konteks tersebut, tulisan, tag, simbol, dan gambar di dinding menjadi penanda keberadaan sekaligus sarana menantang batas-batas sosial yang dianggap membatasi. Sifatnya yang subversif membuat grafiti terus berada di antara dua penilaian: seni urban yang sah dan tindakan vandalisme (Aco, 2024).

Praktik menulis pada dinding telah dikenal sejak peradaban kuno, tetapi grafiti modern berkembang pesat di kota-kota Amerika Serikat pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Pada mulanya, pelaku menuliskan nama atau identitas kelompok pada kereta dan bangunan publik. Perkembangan berikutnya melahirkan bentuk yang lebih kompleks, seperti wildstyle, mural, dan karya dengan pesan sosial-politik. Perubahan ini memperluas fungsi grafiti dari penandaan identitas menjadi komentar budaya serta media protes. Perdebatan mengenai vandalisme tetap berlangsung karena penilaian terhadap grafiti bergantung pada kepemilikan ruang, izin, pesan, dan posisi sosial pembuatnya (Pramana & Irfansyah, 2019).

Di Indonesia, grafiti telah digunakan untuk menyampaikan pesan politik sejak masa perjuangan kemerdekaan dan berkembang kuat dalam budaya kota sejak 1970-an. Tag, nama kelompok, kritik sosial, dan mural menjadi bagian dari perebutan ruang visual di Jakarta dan kota-kota lain. Pada dekade 1980-an hingga awal 1990-an, grafiti kerap dikaitkan dengan identitas geng atau sekolah, tetapi kemudian juga digunakan untuk memperindah kawasan, membangun identitas komunitas, dan mengomentari kebijakan publik. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa grafiti tidak memiliki makna tunggal; ia dapat menjadi ekspresi estetis, identitas kelompok, promosi, maupun perlawanan sosial (Setem et al., 2011).

Fenomena serupa hadir di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa menggunakan grafiti untuk menanggapi aturan internal, ketimpangan fasilitas, biaya pendidikan, pembatasan organisasi, dan berbagai isu sosial. Penelitian Aco (2024) mengenai Komunitas Pojok Street Art Bali memperlihatkan bagaimana seni jalanan digunakan untuk menantang dominasi narasi seni

tradisional sekaligus menyuarakan kegelisahan sosial, budaya, dan lingkungan. Di Makassar, tulisan dan gambar kritis juga ditemukan pada tembok Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Negeri Makassar. Keberadaannya memperlihatkan bahwa ruang kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai arena negosiasi antara kebebasan mahasiswa dan kontrol institusional.

Penelitian ini menggunakan teori perlawanan sehari-hari James C. Scott untuk memahami grafiti mahasiswa. Scott (1985) menjelaskan bahwa kelompok subordinat tidak selalu melakukan perlawanan melalui mobilisasi terbuka. Ketika konfrontasi langsung berisiko, mereka mengembangkan tindakan kecil, anonim, simbolik, dan tersembunyi. Konsep *hidden transcript* merujuk pada kritik yang berkembang di luar panggung resmi kekuasaan. Kritik tersebut dapat diwujudkan melalui rumor, sindiran, penghindaran, simbol, atau bentuk komunikasi lain yang memungkinkan kelompok lemah mempertahankan martabat dan menyatakan ketidaksetujuan tanpa menampilkan identitas secara terbuka.

Dalam konteks kampus, grafiti dapat dibaca sebagai *hidden transcript* karena mahasiswa menggunakan kata, gambar, dan simbol untuk mengkritik kebijakan tanpa berhadapan langsung dengan birokrasi. Anonimitas, pemilihan waktu, serta penggunaan lokasi strategis menunjukkan adanya upaya menyeimbangkan penyampaian pesan dengan penghindaran risiko. Grafiti juga membentuk komunikasi antarmahasiswa: pesan yang dibuat seseorang dapat dikenali dan ditafsirkan oleh mahasiswa lain yang mengalami persoalan serupa. Dengan demikian, grafiti tidak hanya menampilkan kegelisahan individual, tetapi juga memperlihatkan relasi kuasa dan kemungkinan terbentuknya solidaritas di antara kelompok yang merasa dibatasi (Scott, 1985).

Studi terdahulu menunjukkan fungsi grafiti yang beragam. Seni jalanan dapat menantang hegemoni narasi seni (Aco, 2024), memperkuat identitas kawasan wisata (Alim et al., 2024), menjadi objek perlindungan hak cipta sekaligus media kritik (Dewi, 2022), dan menyampaikan komunikasi politik pada masa pandemi (Maknuni, 2021). Penelitian lain membahas konsep diri seniman mural di Jakarta (Masnah, 2020), pembentukan identitas anak muda di Malang (Aulia et al., 2023), serta grafiti satir sebagai kritik sosial di Padang (Putra et al., 2024). Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa grafiti bekerja sebagai bahasa visual yang maknanya dipengaruhi oleh konteks ruang, pembuat, audiens, dan kekuasaan yang mengaturnya.

Walaupun literatur mengenai seni jalanan terus berkembang, kajian yang secara khusus membahas grafiti sebagai perlawanan mahasiswa terhadap kebijakan kampus masih terbatas. Sebagian besar penelitian menempatkan grafiti dalam konteks kota, komunitas seni, pariwisata, atau masyarakat umum. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menelaah motivasi mahasiswa, makna pesan, strategi pembuatan, respons institusi, serta dinamika solidaritas di balik grafiti pada tiga kampus di Makassar. Teori Scott digunakan untuk menjelaskan mengapa ekspresi yang tampak sederhana dapat berfungsi sebagai perlawanan simbolik yang konsisten.

Ketegangan di kampus muncul ketika kebijakan yang berkaitan dengan Uang Kuliah Tunggal, pembatasan waktu aktivitas, ruang organisasi, dan penanganan kekerasan seksual dianggap tidak transparan atau tidak berpihak kepada mahasiswa. Perlawanan tidak hanya hadir dalam demonstrasi, petisi, dan forum terbuka, tetapi juga melalui tulisan di dinding, toilet, lorong, serta area parkir. Pesan seperti “UNHAS FOR SALE”, “#UMI MAHAL”, “UNHAS DARURAT!”, dan “Mana Kursi untuk Kuliah” memperlihatkan bagaimana ruang fisik kampus diubah menjadi ruang kritik.

Tulisan-tulisan tersebut dapat dipahami sebagai perlawanan tersembunyi karena menyampaikan ketidakpuasan secara terbuka di ruang visual, tetapi identitas pembuatnya tetap dilindungi. Pesan mengenai komersialisasi pendidikan, hilangnya ruang kegiatan, atau penanganan kekerasan seksual tidak berdiri sebagai hiasan, melainkan sebagai upaya memaksa persoalan yang diabaikan agar tetap terlihat. Dari perspektif Scott, daya politik grafiti terletak pada kemampuannya mempertahankan kritik di tengah ketimpangan akses antara mahasiswa dan otoritas kampus.

Penelitian ini bertujuan menganalisis motivasi dan makna grafiti mahasiswa, menjelaskan grafiti sebagai bentuk everyday resistance, mengkaji respons mahasiswa terhadap pembatasan ruang ekspresi, serta memahami dinamika sosial dan solidaritas di antara pelakunya. Analisis tersebut diharapkan memperluas pemahaman mengenai seni visual sebagai bagian dari politik keseharian di lingkungan pendidikan tinggi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pengalaman, motivasi, dan makna yang diberikan mahasiswa terhadap praktik grafiti. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus

pada pengukuran frekuensi, melainkan pada konteks sosial, proses pembuatan, pesan, dan hubungan antara mahasiswa dengan otoritas kampus. Analisis dilakukan secara induktif dengan menempatkan penjelasan informan dan hasil pengamatan sebagai dasar penyusunan tema.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universitas Negeri Makassar (UNM) pada 20 April–30 Mei 2025. Ketiga lokasi dipilih secara purposif karena ditemukan grafiti yang memuat kritik terhadap kondisi sosial dan kebijakan internal kampus. Pemilihan kampus negeri dan swasta juga memungkinkan penelitian melihat variasi konteks institusi, bentuk pesan, serta pola pengawasan terhadap aktivitas mahasiswa.

Informan ditentukan melalui snowball sampling karena pelaku grafiti cenderung tidak terorganisasi secara formal dan menjaga identitasnya. Penelitian melibatkan enam mahasiswa: Rizky dan Luthfi dari Unhas, Brian dan Andi dari UMI, serta Abam dan Doni dari UNM. Mereka memiliki pengalaman membuat grafiti, terlibat dalam komunitas seni, atau menggunakan media visual untuk menyampaikan kritik. Seluruh nama merupakan samaran untuk melindungi informan dari risiko akademik dan sosial.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan terhadap bentuk, warna, tulisan, simbol, lokasi, kondisi sekitar, serta perubahan pada grafiti, termasuk ketika karya dihapus atau ditimpa. Wawancara menggali empat tema utama: motivasi membuat grafiti, pemaknaan grafiti sebagai perlawanan sehari-hari, respons terhadap pembatasan ruang ekspresi, dan solidaritas di antara mahasiswa.

Pedoman wawancara digunakan secara fleksibel agar informan dapat menjelaskan pengalaman dengan bahasa mereka sendiri. Peneliti juga menanyakan alasan pemilihan lokasi dan waktu, risiko yang dihadapi, hubungan dengan pelaku lain, serta pandangan terhadap respons kampus. Dokumentasi visual dipakai untuk menghubungkan keterangan informan dengan pesan yang ditemukan pada dinding kampus dan ruang publik di sekitarnya.

Analisis dilakukan dengan mengorganisasi transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian membaca data secara berulang. Data dikelompokkan ke dalam tema motivasi, makna, strategi, simbol, respons institusi, jaringan sosial, dan solidaritas. Setiap tema dibandingkan antarinforman dan antarlokasi, lalu ditafsirkan menggunakan konsep everyday resistance dan hidden transcript James C. Scott.

Etika penelitian dijaga melalui penjelasan tujuan dan prosedur penelitian, persetujuan sukarela, izin perekaman, serta penyamaran identitas. Peneliti mengurus izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Karena aktivitas grafiti dapat menimbulkan teguran atau sanksi, informasi yang dapat mengidentifikasi waktu, lokasi khusus, dan pelaku dibatasi dalam penyajian hasil.

Rangkaian metode tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang kontekstual mengenai grafiti sebagai media kritik, strategi penghindaran risiko, dan pembentuk identitas kolektif mahasiswa.

3. Hasil dan Diskusi

Motivasi dan Makna Grafiti sebagai Ruang Ekspresi Mahasiswa

Grafiti menjadi salah satu cara mahasiswa mengekspresikan keresahan, kritik, dan penolakan terhadap kebijakan kampus. Pesan disampaikan melalui tulisan, gambar, atau simbol pada dinding, lorong, toilet, dan ruang yang dilalui banyak orang. Informan memilih grafiti ketika forum resmi dianggap tidak mampu menampung aspirasi atau ketika kritik terbuka berisiko menimbulkan tekanan. Karena itu, grafiti tidak dipahami sebagai coretan tanpa tujuan, tetapi sebagai media komunikasi alternatif yang mengubah ruang kampus menjadi ruang penyampaian pendapat.



Gambar 1. Grafiti “ANARKIS” di dinding kampus Universitas Hasanuddin

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 1 memperlihatkan grafiti “ANARKIS” yang menggunakan bentuk tulisan, tanda seru, dan simbol tengkorak untuk menarik perhatian. Daya komunikasinya terletak pada visibilitas dan keberlanjutan pesan: berbeda dari pembicaraan yang segera berlalu, tulisan di dinding tetap dapat dibaca selama

belum dihapus. Penempatan grafiti pada ruang bersama memungkinkan pesan menjangkau mahasiswa yang tidak hadir dalam forum atau aksi. Dalam pengertian ini, grafiti membentuk lanskap linguistik kritis yang memengaruhi cara orang membaca ruang kampus (Yendra et al., 2020).

1. Motivasi

Motivasi informan tidak tunggal. Sebagian membuat grafiti untuk meluapkan keresahan pribadi, sedangkan yang lain berusaha mewakili pengalaman kolektif mengenai pembatasan organisasi, biaya pendidikan, fasilitas, kekerasan seksual, atau tindakan aparat. Grafiti dipilih karena lebih langsung, mudah dilihat, dan tidak bergantung pada izin birokrasi. Pesan yang singkat juga dapat memadatkan persoalan kompleks menjadi kalimat yang mudah diingat. Dengan demikian, tindakan membuat grafiti merupakan respons kreatif terhadap ketimpangan akses komunikasi antara mahasiswa dan pengambil kebijakan.

Rizky memandang tembok sebagai ruang yang relatif aman bagi mahasiswa yang tidak berani menyampaikan kritik secara terbuka. Menurutnya, kertas mudah hilang dan hanya dibaca oleh sedikit orang, sedangkan dinding memperluas jangkauan pesan. Grafiti baginya merupakan “bahasa perlawanan” yang memungkinkan isi pikiran tetap terlihat walaupun pembuatnya tidak hadir.

“Lebih ke mauji sampaikan pesan sih di tembok-tembok, kadang kalau kayak di kertas toh cepatki hilang, dan saya orangnya keteteran ka kalau gambar-gambar di situ toh. Masa sayaji liatki? Kenapa nda di’ kalau di tembok toh, lebih banyak bisa orang liat. Jadi natau apa yang kupikir, itu sih”-Rizky.

Pernyataan Rizky menunjukkan bahwa pemilihan medium berkaitan dengan daya jangkau. Tembok kampus tidak hanya menjadi pembatas bangunan, tetapi juga permukaan komunikasi yang dapat direbut sementara oleh mahasiswa. Melalui grafiti, mereka menandai keberadaan, mengungkapkan pengalaman, dan mengarahkan perhatian pada persoalan yang tidak memperoleh tempat dalam narasi resmi. Praktik ini juga menantang dominasi pesan institusional, iklan, dan tanda formal yang biasanya menguasai ruang publik (Aco, 2024).

Luthfi menambahkan bahwa grafiti dibutuhkan sebagai medium di luar media sosial. Tembok dipilih karena mudah dijumpai dan terus dilalui orang. Artinya, motivasi pembuat tidak berhenti pada kebutuhan mengekspresikan diri, tetapi juga keinginan membangun audiens dan memicu perhatian bersama.

“Kalau yang mendorong saya dalam melakukan kegiatan itu sebenarnya dari dirita ji sendiri mengekspresikan apa yang kita mau sampaikan. Ituji sebenarnya, karena sebenarnya kita butuh media toh selain media sosial untuk lampiaskan ki ini ekspresita. Menurutta itu tembok itu media paling gampang dijumpai dan paling sering dilalui sama orang, jadi kita lampiaskan ke tembok mi”-Luthfi.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa grafiti merupakan komunikasi yang otonom dan relatif demokratis. Anonimitas melindungi pelaku, sedangkan ruang publik mempertemukan pesan dengan orang yang mungkin tidak terlibat dalam organisasi atau forum kampus. Grafiti karenanya berfungsi sebagai klaim atas ruang sekaligus pernyataan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk menafsirkan dan mengkritik lingkungan tempat mereka belajar (Wulandari & Rahmat, 2021).

2. Makna

Makna grafiti berkaitan erat dengan pengalaman mahasiswa terhadap kebijakan kampus. Pesan yang muncul bukan sekadar ekspresi estetis, melainkan hasil dari pembatasan jam malam, melemahnya kegiatan organisasi, komersialisasi pendidikan, tindakan aparat, dan penanganan kekerasan seksual yang dianggap tidak memadai. Keresahan tersebut diubah menjadi sindiran, pertanyaan, atau seruan langsung. Dengan cara itu, dinding menjadi arsip pengalaman mahasiswa sekaligus ruang untuk menilai kebijakan dari sudut pandang mereka.



Gambar 2. Grafiti “Mana BEM? Matimi” di Area FISIP Unhas

Sumber: Dokumentasi Penulis

“Lebih ke keresahan yang kurasa sih. Semisal pembatasan jam malam, ku tulis mi situ apa sebenarnya mauku. Mungkin lebih ke kurasa, contoh mi semisal di lingkungan LEMA (Lembaga Mahasiswa) toh, kemarin yang ku rasakan ramai,

sekarang nda mi. Jadi kutulismi di tembok kalau kemana semua ini teman-teman yang kemarin-kemarin. BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) juga yang tidak adami, itumi juga pengaruhiki hilangnya anak-anak. Kurang lebih begitu toh, kayak ekspresi diriji sih, kayak ada seninya tersendiri kalau gambar ki di dinding dan dibaca sama orang"-Rizky.

Grafiti "Mana BEM? Matimi" pada Gambar 2 menunjukkan kritik terhadap melemahnya aktivitas lembaga mahasiswa. Bagi Rizky, hilangnya keramaian organisasi dan pembatasan waktu berkegiatan tidak hanya mengubah suasana kampus, tetapi juga mengurangi ruang belajar politik mahasiswa. Tulisan tersebut mengandung pertanyaan mengenai keberadaan representasi mahasiswa dan sekaligus menyampaikan kekecewaan terhadap situasi yang dianggap semakin pasif. Grafiti memadatkan pengalaman itu menjadi pesan visual yang mudah dikenali.

Doni menyebut grafiti sebagai media yang jujur karena birokrasi, forum diskusi, dan penilaian negatif terhadap kritik membuat ekspresi langsung semakin sulit. Setiap tulisan di tembok merupakan pernyataan sikap yang menembus batas formal. Ia menggunakan istilah "teriak tanpa suara" untuk menggambarkan protes yang tidak disampaikan melalui pidato, tetapi tetap hadir dan mengganggu ketenangan visual institusi.

"Karena menurutku grafiti itu media paling jujur mi. Di saat ini birokrasi ribet sekali, forum diskusi dibatasi, dan kritik dianggap gangguan, yahh grafiti itu jadi satu-satunya ruang bebas. Ilegal ki memang, tapi ndada mi media lain yang bisa ki jujur ekspresikan diri ta"-Doni

Ungkapan tersebut menempatkan grafiti sebagai komunikasi politik. Sejarah grafiti di Indonesia memperlihatkan bahwa tulisan dinding bertahan sebagai media aspirasi ketika kritik terbuka dibatasi (Indriyati, 2011). Dalam konteks kampus, kejujuran grafiti bukan berarti pesannya netral, melainkan bahwa mahasiswa dapat menyampaikan penilaian yang sulit diucapkan di ruang resmi. Anonimitas mengurangi risiko personal, tetapi tidak menghilangkan ketajaman kritik.

Isu kekerasan seksual dan pembatasan jam malam memperlihatkan hubungan antara kebijakan dan emosi pembuat. Rasa muak, kecewa, serta tidak percaya terhadap mekanisme resmi mendorong mahasiswa memilih pesan singkat dan keras. Grafiti "UNHAS DARURAT!!" pada Gambar 3 menunjukkan keadaan yang dipersepsikan mendesak dan menuntut perhatian, terutama ketika sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual dianggap tidak sebanding dengan dampak yang dialami korban.

"Yang dorongka itu rasa muak. Banyak kebijakan kampus yang menurutku nabebankanki mahasiswa, contohnya itumi yang bisa dilihat kekerasan seksual dan pembatasan jam malam di Unhas, nabikinki ruang geraknya mahasiswa semakin sempit. Yah bisa dibilang, disinimi tempatku untuk 'teriak tanpa mengeluarkan suara'" -Doni



Gambar 3. Grafiti "UNHAS DARURAT!!" bentuk kritik kasus pelecehan seksual

Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam kerangka Scott, pesan tersebut merupakan perlawanan kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap pengambilan keputusan. Mahasiswa tidak harus mengorganisasi aksi terbuka untuk menampilkan ketidaksetujuan; mereka menggunakan dinding, toilet, dan lorong sebagai panggung alternatif. Perlawanan ini tersembunyi dari sisi identitas pelaku, tetapi terbuka dari sisi pesan. Kombinasi tersebut membuat grafiti relatif aman sekaligus sulit diabaikan. Ia mempertahankan martabat mahasiswa dengan menunjukkan bahwa kebijakan kampus tetap dapat dipersoalkan.

Brian memandang grafiti sebagai alat perjuangan bagi orang yang tidak memiliki jabatan, akses forum, atau keberanian berbicara langsung. Jalan dan dinding kosong menjadi medium protes yang dapat dijangkau masyarakat. Bagi Brian, perbedaan grafiti dengan karya seni biasa terletak pada tujuan politiknya: kemampuan visual digunakan untuk menyampaikan propaganda, membangun kesadaran, dan mempertemukan suara yang terpinggirkan.

"Sebenarnya di jalan itu kan kebanyakan vandal itu dia mengokupasi ruang publik, tembok-tembok yang nda dipakai, atau tanah yang di jaga, apa yang mendorong itu adalah sebuah medium kita mau melakukan protes, kita mau melakukan propaganda, jadi akses yang paling bisa, yang langsung dicapai oleh masyarakat untuk propaganda ya jalanan, nah ruang-ruang publik itu lah. Kalau mau dilihat secara sempit ya, dia sebuah seni. Betul kalau dia sangat sempit ya, setiap kita punya banyak kebiasaan begitu, entah dalam melukis, dalam corat-coret apa saja bentuknya. Cuma bedanya adalah, orang-orang yang menjadikan medium seni

sebagai media protes, karena tidak semua orang bisa ngomong, bicara secara langsung melakukan protes nya, dan tidak semua orang mempunyai keberanian”- Brian.

Penjelasan Brian menunjukkan bahwa grafiti menjembatani ruang pribadi dan publik. Kegelisahan yang semula dialami individu menjadi pesan yang dapat dibaca dan ditanggapi orang lain. Dari proses tersebut dapat muncul komunitas kecil, percakapan, atau pengakuan bahwa persoalan yang dihadapi bukan pengalaman pribadi semata. Karena itu, makna grafiti terletak sekaligus pada isi pesan dan pada hubungan sosial yang mungkin dibentuknya (Puspita, 2024).

Semua informan menyatakan bahwa isi grafiti dipengaruhi oleh kebijakan kampus. Pembatasan kegiatan, pengawasan kritik, persoalan biaya pendidikan, dan isu kekerasan memunculkan tema yang berbeda, tetapi semuanya berangkat dari persepsi bahwa saluran formal tidak memadai. Rizky menuturkan bahwa dinding dan toilet dipakai agar kekecewaan terhadap kebijakan dapat dibaca mahasiswa lain. Doni menyebut grafiti sebagai respons langsung terhadap kebijakan yang masih perlu diperbaiki.

“Sering sih, karena kan mu taumi kampus lah, kalau dikritik, bagaimana ya na anggap negatifki. Jadi mau nda mau pasti cariki kepuasan di tempat lain toh. Misal digambar di tembokkah, di wc kah, setidaknya apa yang kurasa tentang kebijakan kampus yang nda sesuai, bisalah dibaca sama orang lain, kan ya sebagai pesanku ke teman-teman yang lain kalau kampus ini ada salahnya di sini”-Rizky.

Temuan tersebut memperkuat fungsi grafiti sebagai kritik sosial. Aulia et al. (2023) menjelaskan bahwa grafiti digunakan untuk menyampaikan protes terhadap isu yang dianggap tidak sesuai oleh kelompok tertentu. Di kampus, bentuk visual yang mencolok dapat memancing perhatian, mengubah percakapan, dan mempertanyakan legitimasi aturan. Walaupun kerap dilabeli vandalisme, pesan yang muncul tetap menyediakan informasi mengenai persoalan yang dirasakan mahasiswa.

“Pastinya sangat mempengaruhi, karena inimi kurasa bentuk respons langsungku ke kebijakan kampus yang kurasa masih perlu diperbaiki”-Doni.

Brian menghubungkan grafiti dengan terbatasnya dialog dan menguatnya logika ekonomi dalam pendidikan. Menurutny, ketika suara langsung tidak didengar, tulisan di tempat yang dilewati pengambil kebijakan menjadi cara “menyadap pandangan” mereka. Grafiti protes UKT pada Gambar 4 memperlihatkan kritik terhadap pendidikan yang diperlakukan sebagai

komoditas. Pesan tersebut menuntut agar akses pendidikan dipahami sebagai kepentingan publik, bukan hanya sumber pendapatan institusi.



Gambar 4. Grafiti Protes UKT Tinggi di dinding kampus UMI

Sumber: Dokumentasi Penulis

“Sebenarnya juga protes itu hadir karena kebanyakan suara langsung itu tidak bisa di dengar. Jadi yang paling memungkinkan kita lakukan adalah menyadap pandangannya, kalau nda bisa na dengar langsung suaraku setidaknya kalau dia lewat di depan kantor nya, dia lewat semisal di jalan yang dia lewati, dia lihat itu protes, melalui tulisan. Setiap kampus lah begitu, karena dia dikendarai oleh sistem ekonomi. Pendidikan itu barang publik, dia barang publik maka pendidikan itu seharusnya seperti ‘udara yang gratis’ untuk kita hirup. Tapi karena adanya sistem ekonomi kapitalisme. Pengambilan kebijakannya pun pasti hanya melihat bahwa siapa yang memiliki kepentingan”-Brian.

Andi juga menilai birokrasi kampus cenderung menempatkan mahasiswa sebagai objek kebijakan. Di UMI, ia mengaitkan grafiti dengan kritik terhadap masuknya aparat dan pengalaman kekerasan di lingkungan kampus. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat mahasiswa semakin vokal karena kebijakan keamanan justru dapat menciptakan rasa terancam. Grafiti menjadi cara menyimpan ingatan atas peristiwa dan menolak normalisasi tindakan represif.

“Yah kita sama-sama tahu lah bagaimana birokrasi dalam kampus kita yang cuman memeras kita sebagai bahan komoditas yang bisa untuk diperas. Hal ini membuat saya semakin vokal untuk mengkritisi apa yang menjadi kebijakan kampus yang menurut saya tidak seperti itu harusnya. Contohnya, kalau di UMI, aparat di dalam kampus, sebenarnya tidak perlu lagi kita pungkiri bagaimana kita melihat tindak kekerasan aparat yang terjadi di dalam kampus UMI. Ada track recordnya begitu, kenapa kami sering mengajukan yang namanya pentas amarah ataupun

memperingati yang namanya amarah kampus UMI. Masalahnya, ada loh peristiwa seperti itu yang dilakukan oleh para aparat, untuk melakukan yang namanya tendensi. Bagi kita seorang mahasiswa yah bagaimana kita mengkritisi bagaimana kami mempertanyakan kenapa kok kampus bisa kasi masuk begitu. Yah, saya semakin frontal untuk menyuarkan hal itu"-Andi.

Pandangan Andi sejalan dengan kajian yang menempatkan grafiti sebagai sarana anak muda menyampaikan aspirasi politik secara kreatif (Setem et al., 2011). Ketegangan dengan pihak berwenang menguat ketika pesan diarahkan secara terbuka kepada institusi. Oleh sebab itu, makna grafiti di tiga kampus tidak dapat dipisahkan dari perebutan kewenangan untuk menentukan pesan apa yang boleh hadir di ruang akademik.

Secara keseluruhan, mahasiswa memaknai grafiti sebagai ruang untuk menyatakan identitas, menolak ketidakadilan, dan menyampaikan kritik tanpa konfrontasi langsung. Dinding memungkinkan pesan bertahan setelah pelaku pergi dan memberi kesempatan kepada mahasiswa lain untuk menafsirkan atau melanjutkannya. Dalam pengertian Scott, tindakan ini merupakan perlawanan simbolik kelompok yang posisinya lebih lemah terhadap struktur institusi.

Grafiti dengan demikian bukan hanya produk visual, tetapi strategi untuk mempertahankan hak atas ruang, suara, dan ingatan. Ia menegaskan keberadaan mahasiswa sebagai subjek aktif yang dapat menilai kebijakan kampus, meskipun kritik tersebut disampaikan dari luar saluran resmi.

Grafiti sebagai Bentuk Perlawanan Sehari-hari (Everyday Resistance)

Grafiti di lingkungan kampus dapat dipahami sebagai everyday resistance karena muncul dari situasi ketika mahasiswa merasa dikontrol, tetapi tidak selalu memiliki kemampuan melakukan konfrontasi terbuka. Scott (1985) menjelaskan bahwa perlawanan sehari-hari berlangsung melalui tindakan kecil, berulang, tersembunyi, dan sulit dihentikan sepenuhnya. Grafiti memenuhi ciri tersebut: pesan dibuat tanpa prosedur formal, identitas pelaku disembunyikan, dan kritik ditempatkan pada ruang yang dapat dilihat publik.

Mahasiswa memilih grafiti karena memberikan kebebasan, jangkauan, dan kekuatan visual. Dinding kampus, lorong, toilet, jembatan, serta flyover dapat mengubah kalimat singkat menjadi pesan publik. Warna, simbol, dan lokasi membantu menarik perhatian serta memicu diskusi. Akan tetapi, kebebasan itu selalu disertai risiko karena institusi menganggap grafiti sebagai pelanggaran tata tertib atau kerusakan aset. Keputusan untuk tetap membuatnya menunjukkan bahwa mahasiswa menilai penyampaian aspirasi lebih penting

daripada kepatuhan penuh terhadap aturan ruang.

Rizky mengakui bahwa grafiti dapat dikategorikan sebagai perlawanan karena menyampaikan kritik secara tidak langsung. Pernyataan ini penting karena pelaku tidak selalu merencanakan perubahan struktural besar; mereka terlebih dahulu berusaha memastikan keresahan dapat dinyatakan. Dalam teori Scott, tindakan semacam ini mempertahankan otonomi dan martabat kelompok subordinat, bahkan ketika dampaknya tampak kecil.

“Bisa jadi, karena itu sebagai media penyampaian secara tidak langsung. Iya sih bisa dikategorikan juga sebagai bentuk perlawanan”-Rizky

Anonimitas menjadi unsur utama. Berbeda dengan forum resmi yang mensyaratkan identitas, prosedur, dan hierarki, grafiti memungkinkan pesan berdiri tanpa nama pembuat. Kondisi tersebut memberi perlindungan relatif bagi mahasiswa yang membahas isu sensitif. Pada saat yang sama, pesan dapat diakses siapa saja dan ditafsirkan berdasarkan pengalaman masing-masing. Grafiti karenanya membentuk komunikasi yang bebas, tetapi tidak sepenuhnya tanpa batas karena keberadaannya tetap bergantung pada pengawasan dan respons pemilik ruang (Wulandari & Rahmat, 2021).

Praktik pembuatan grafiti memperlihatkan perencanaan. Informan mempertimbangkan waktu malam, lokasi yang tidak terjangkau CCTV, jalur yang sering dilalui, serta kemungkinan hadirnya petugas keamanan. Mereka berusaha mendapatkan dua kondisi sekaligus: pelaku tidak terlihat, tetapi pesan terlihat jelas. Strategi tersebut menunjukkan bahwa grafiti bukan tindakan acak. Pemilihan ruang merupakan negosiasi antara visibilitas, keamanan, dan kemungkinan pesan bertahan.

“Kalau waktu lebih ke malam sih pasti, karena kalau ramai yah takut didapat sama kayak ‘apakah ini orang merusak pemandangan’, ‘apakah ini orang kayak mau dibilang’ ‘oh inimi yang suka vandal vandal’, bukanji itu iya yang dimaksud, yah penyampaian ekspresi ji apa yang kurasa toh. Ya kalau tempat, kalau sekarang lebih ke yang nda terjangkau sama cctv, tempat utamanya lebih ke di mana orang sering lewat”-Rizky

Pernyataan Rizky mengenai waktu malam dan penghindaran kamera memperlihatkan cara mahasiswa menyesuaikan tindakan dengan kontrol institusi. Proses ini serupa dengan praktik seniman mural yang memilih waktu dan lokasi secara hati-hati untuk mengurangi gangguan aparat atau pemilik bangunan. Berkarya di ruang publik berarti menegosiasikan kehadiran dengan

aturan yang membatasi, sehingga aspek teknis pembuatan sekaligus menjadi strategi sosial (Yani et al., 2016).

Risiko yang dihadapi meliputi teguran, pencarian pelaku, skorsing, hingga ancaman drop out. Luthfi menyebut seorang temannya hampir dikeluarkan karena terlihat melakukan vandal. Risiko lain adalah karya dihapus, ditimpa, atau ditolak oleh kelompok yang tidak setuju dengan pesannya. Ancaman tersebut menjelaskan mengapa kerahasiaan, kepercayaan, dan pemilihan tempat menjadi bagian penting dari praktik grafiti.

“Ada, banyak itu resiko, salah satunya itu temanku dia hampir di DO (Drop Out) gara-gara kelihatan vandal dan sanksinya itu yah paling berat DO”-Luthfi

Pelabelan grafiti sebagai tindakan destruktif menempatkan pelaku dalam posisi rentan. Institusi cenderung menilai cara pembuatan dan kepemilikan dinding, sedangkan mahasiswa menekankan isi pesan dan kebutuhan berekspresi. Perbedaan penilaian ini menghasilkan konflik mengenai siapa yang berhak menentukan makna ruang kampus. Ancaman sanksi akademik memperlihatkan bahwa perlawanan simbolik tetap mempunyai konsekuensi nyata, sehingga keberanian pelaku tidak dapat dipisahkan dari perhitungan risiko.

Selain tulisan langsung, pelaku menggunakan simbol yang memiliki makna khusus. Abam menyebut tangan terkepal, kode “1312”, dan “ACAB” sebagai simbol protes terhadap aparat dan sistem otoriter. Simbol tersebut efektif karena singkat, mudah direproduksi, dan dikenali oleh kelompok tertentu. Ia membentuk komunikasi internal yang tidak selalu dipahami oleh semua orang, tetapi cukup jelas bagi audiens yang memiliki pengalaman atau pengetahuan serupa.

“Iya, ada pola-pola tertentu. Kayak 1312 atau ACAB artinya itu ‘All Cops Are Bastards’ biasanya dipakai buat simbol protes ke aparat, biasa juga kayak tangan yang terkepal begitu, yah sebagai symbol perlawanan”-Abam.



Gambar 5. Grafiti “1312!” di depan Pos Polisi Pettarani

Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 5 memperlihatkan kode “1312” di depan Pos Polisi Pettarani. Dalam perkembangan seni jalanan pasca-Orde Baru, simbol semacam ini menjadi bagian dari partisipasi politik non-elektoral dan kritik terhadap kekerasan aparat (Pramana & Irfansyah, 2019). Maknanya melampaui ekspresi individu karena digunakan pada berbagai peristiwa dan ruang. Pengulangan kode menciptakan ingatan kolektif serta menghubungkan pengalaman lokal dengan jaringan kritik yang lebih luas.

Simbol “1312” dan “ACAB” juga muncul dalam respons publik terhadap Tragedi Kanjuruhan dan pembungkaman kelompok musik kritis. Dalam penelitian ini, konteks tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tidak menciptakan semua simbol dari awal, tetapi mengambil bahasa perlawanan yang telah beredar dan menyesuaikannya dengan pengalaman kampus. Pemilihan lokasi turut menentukan jangkauan. Brian menyebut flyover, jembatan, dan jalur ramai sebagai tempat yang sering memuat grafiti, terutama setelah demonstrasi.



Gambar 6. Grafiti di dinding flyover

Sumber: Dokumentasi Penulis

“Kadang yang kuliati ya kalau semisal saya pergi kampus kan di flyover itu selalu banyak grafiti di situ, di flyover, di jembatan, di Pampang dan lain-lain sebagainya. Selalu ada. Apalagi kalau setelah aksi, setelah aksi itu pasti ada”-Brian.

Gambar 6 menegaskan pentingnya visibilitas ruang. Flyover dan jembatan memiliki bidang luas, dilalui banyak orang, serta menghubungkan pesan kampus dengan masyarakat kota. Grafiti di tempat semacam itu menjadi bagian dari narasi sosial yang terus berubah mengikuti aksi, kebijakan, dan peristiwa politik. Ia bukan sekadar hiasan, melainkan komunikasi visual yang dapat memperpanjang umur isu setelah kerumunan demonstrasi bubar.

Walaupun beberapa karya dibuat spontan, informan juga menjelaskan adanya koordinasi dalam kelompok kecil. Diskusi dilakukan untuk menyepakati pesan, memilih lokasi, menentukan waktu, membagi peran, dan mengurangi kemungkinan tertangkap. Koordinasi tidak selalu menghasilkan organisasi formal; sering kali cukup melalui jaringan pertemanan dan kepercayaan. Bentuk yang lentur ini sesuai dengan everyday resistance karena tidak memerlukan struktur besar untuk menghasilkan tindakan kolektif.

Koordinasi tersebut menunjukkan bahwa grafiti berada di antara ekspresi individual dan gerakan bersama. Seseorang dapat menulis berdasarkan emosi pribadi, tetapi pesan, simbol, dan lokasinya tetap berhubungan dengan keresahan kolektif. Pengalaman Brian yang pernah ditangkap ketika menempel poster juga memperlihatkan bahwa berbagai media visual – poster, mural, dan grafiti – berbagi risiko ketika digunakan untuk mengkritik institusi.

“Ada memang yang kadang sendiri ji, tapi ada juga yang berkelompok, kek pernah, saya bukan yang grafiti ya tapi kayaknya ini bisa dikatakan vandal juga, kan vandal itu banyak ki toh. Saya pernah tempel poster, saya pernah tempel poster di satu kampus negeri di Makassar yang pada akhirnya saya ditangkap”-Brian.

Dalam kerangka Scott, malam hari, anonimitas, kode simbolik, dan jaringan informal merupakan teknik penghindaran risiko. Tujuan langsungnya bukan selalu mengganti struktur kekuasaan, melainkan menolak diam, mempertahankan harga diri, dan menjaga agar ketidakadilan tetap dibicarakan. Grafiti menjadi “teriakan diam” karena pelaku tidak hadir di hadapan otoritas, tetapi pesannya tetap bekerja di ruang yang dikuasai institusi.

Dengan demikian, grafiti mahasiswa merupakan perlawanan yang pragmatis, strategis, dan adaptif. Ia menggabungkan simbolisme, pemilihan ruang, pengaturan waktu, anonimitas, dan dukungan jaringan informal. Ketika jalur resmi dianggap tidak setara, grafiti menyediakan cara untuk mempertahankan ruang ekspresi dan menantang dominasi simbolik birokrasi kampus secara tidak langsung, tetapi berulang.

Respons Mahasiswa Terhadap Pembatasan Ruang Grafiti

Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari kehidupan akademik, tetapi informan melihat adanya kebijakan yang menyempitkan ruang tersebut. Pembatasan jam malam, pengawasan kegiatan, pelarangan aksi visual, dan regulasi administratif membuat mahasiswa merasa partisipasinya dikendalikan. Respons mereka beragam, namun grafiti dipilih ketika forum mahasiswa dianggap tertutup atau tidak menghasilkan perubahan. Dalam

konteks ini, grafiti menjadi tindakan simbolik yang menandai konflik antara kontrol institusi dan hak mahasiswa untuk menyampaikan penilaian.

Rizky menilai kampus tidak menyediakan ruang yang cukup untuk mengevaluasi kebijakan, terutama mengenai Kartu Indonesia Pintar dan penggolongan UKT. Ketidaktransparanan membuat tembok berfungsi sebagai tempat bertanya, walaupun ia menyadari kemungkinan pesan tersebut tidak dijawab. Grafiti “UNHAS FOR SALE” pada Gambar 7 menyampaikan kecurigaan terhadap komersialisasi pendidikan setelah perubahan status kelembagaan. Kritik diarahkan pada kenaikan biaya yang dianggap tidak diikuti peningkatan fasilitas dan layanan.



Gambar 7. Grafiti “UNHAS FOR SALE” di Area FIB Unhas

Sumber: Dokumentasi Penulis

“Sebenarnya mahasiswa ataupun saya toh, begituka karena nda ada ruang yang dikasi untuk kita evaluasi kebijakannya kampus, dan sekarang kayak tertutup sekali. Ini pun kayak KIP dan penggolongan UKT, tidak transparanki, dan itu mami mediaku bertanya lewat tembok dan berharap dibaca sama pihak lain ya walaupun tidak mungkin lah dibalas”-Rizky.

Pemilihan dinding sebagai medium memungkinkan pertanyaan mengenai UKT dilihat oleh mahasiswa, dosen, pegawai, dan pihak yang melewati lokasi tersebut. Pesan “UNHAS FOR SALE” menyederhanakan kritik terhadap logika pasar dalam pendidikan tinggi menjadi kalimat provokatif. Walaupun tidak menjelaskan seluruh persoalan kebijakan, grafiti berhasil menempatkan isu biaya dan transparansi di ruang bersama serta mengundang pembaca menilai arah pengelolaan kampus.

Andi mengkritik sikap kampus yang melarang semua bentuk grafiti tanpa membedakan isi, konteks, dan tujuan. Menurutnya, penilaian semacam itu menciptakan standar ganda: kampus mengajarkan kebebasan berpikir, tetapi

menolak ekspresi yang tidak mengikuti saluran formal. Larangan yang terlalu kaku justru dapat mendorong pesan yang lebih tajam karena mahasiswa melihat penghapusan grafiti sebagai pembungkaman, bukan sekadar perawatan fasilitas.

“Menurut saya, kampus tidak boleh terlalu baku ya terhadap norma, karena dari pengalaman saya pribadi atau pendapat saya pribadi, saya rasa yang dilakukan oleh kampus itu adalah standar ganda. Yang di mana melihat ini (grafiti) begitu, ini hal biasa dan sama sekali tidak boleh dilakukan, atau ketika kau melakukan ini sama halnya dengan kau melakukan dosa yang sangat begitu besar gitu. Makanya tidak boleh. Dan ya, menurut saya kampus seharusnya jauh lebih terbukalah dalam berpikir, apalagi mereka adalah para orang-orang yang mengatur pendidikan secara formalitas dengan menghimpun beberapa individu yang berbeda. Kayaknya kampus juga perlu tahu begitu, tentang apa sih yang coba mereka lakukan, para mahasiswaku ini, ituji kalau saya”-Andi.

Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa grafiti tidak dapat dinilai hanya dari aspek legalitas atau estetika. Ia juga merupakan indikator adanya persoalan komunikasi antara mahasiswa dan institusi. Kampus memang memiliki tanggung jawab menjaga aset, tetapi fungsi akademik menuntut adanya ruang yang memungkinkan kritik. Respons yang semata-mata represif berisiko menghilangkan tanda visual tanpa menyelesaikan masalah yang melatarbelakanginya.

Dalam lanskap pasca-Orde Baru, seni jalanan berkembang sebagai partisipasi politik non-elektoral yang menggugat dominasi wacana resmi (Pramana & Irfansyah, 2019). Luthfi membandingkan grafiti dengan demonstrasi dan petisi. Menurutnya, aksi terbuka berlangsung pada waktu tertentu, sedangkan grafiti dapat bertahan beberapa jam atau hari dan terus dibaca. Daya tahan tersebut menjadikan pesan visual efektif untuk mempertahankan isu di ruang publik kampus.

“Sebenarnya grafiti ini atau vandal, lumayan efektif untuk menyampaikan sebuah pesan. Karena kalau cuma aksi demonstrasi itu biasa cuma lewat dibandingkan vandal, dia akan bertahan beberapa jam atau beberapa hari, dan orang juga pasti baca”-Luthfi

Pandangan Luthfi sejalan dengan konsep *weapons of the weak*. Scott (1985) menekankan bahwa perlawanan sehari-hari dapat bertahan tanpa mobilisasi massa, organisasi kompleks, atau konfrontasi langsung. Grafiti menghadirkan kritik secara berulang sambil melindungi identitas pelaku. Selama belum dihapus, pesan dapat dibaca kapan pun dan menjangkau orang yang tidak mengikuti demonstrasi. Karena itu, efektivitasnya tidak hanya diukur

dari perubahan kebijakan segera, tetapi dari kemampuan menjaga perhatian dan memperluas percakapan.

Doni juga menilai grafiti mempunyai kelebihan karena hadir secara fisik di depan pembaca. Petisi dan demonstrasi dapat diabaikan setelah kegiatan selesai, sedangkan tulisan di dinding tetap menginterupsi pemandangan sehari-hari. Kehadiran ini membuat grafiti efisien sebagai protes: pelaku tidak harus terus berada di lokasi, tetapi pesan tetap bekerja dan dapat memicu respons.

“Menurutku adaki kelebihan tersendiri ini grafiti. Demonstrasi atau petisi sering kali didengar hanya di saat-saat tertentu, bahkan iya diabaikan biasa sama kampus. Kalau grafiti itu hadirki secara fisik, nyata, dan adaki di depan matanya orang-orang”-Doni.

Daya komunikasi tersebut menjadikan grafiti ruang diskursif alternatif. Pesan visual memungkinkan mahasiswa menghubungkan keresahan pribadi dengan isu kolektif, menjangkau audiens yang lebih luas, dan mempertahankan kritik di tengah birokrasi. Namun, kekuatan ini sekaligus menjelaskan mengapa kampus cepat merespons. Grafiti menantang kemampuan institusi mengendalikan tampilan ruang dan mendefinisikan pesan yang dianggap sah.

Informan menyatakan bahwa grafiti sering dihapus dalam waktu singkat. Gambar 8 memperlihatkan tulisan “Persetan Dengan Regulasi” yang ditimpa cat. Bagi pihak kampus, penghapusan dapat dipahami sebagai penegakan aturan dan perawatan aset. Bagi mahasiswa, tindakan yang sama dibaca sebagai penghilangan kritik. Perbedaan makna tersebut memperlihatkan konflik simbolik mengenai kepemilikan ruang, ketertiban, dan kebebasan berpendapat.



Gambar 8. Grafiti “Persetan Dengan Regulasi” yang ditimpa cat

Sumber: Dokumentasi Penulis

“Deh janganmi ditanya ini, cepat sekali kalau reaksinya kampus. Biasa nda

sampeji satu hari itu hilangmi, dicatki kembali toh"-Doni.

Doni menyebut grafiti kerap dicat ulang sebelum satu hari. Brian menganggap penghapusan dapat dimaklumi karena dinding merupakan aset kampus, tetapi ia berharap isi pesannya terlebih dahulu dibaca dan didiskusikan. Pandangan ini menunjukkan bahwa tuntutan utama mahasiswa bukan selalu membiarkan semua grafiti, melainkan adanya respons terhadap persoalan yang disampaikan. Penghapusan tanpa dialog membuat mereka merasa suara mahasiswa ditolak bersama dengan gambarnya.

"Menurutku wajarji kalau dihapus, karena memang asetnya kampus toh. Cuman kadang yang dimau itu sebenarnya dibaca itu tulisanta dan didiskusikanki kembali, tapi yah maumi bagaimana, nda adaji juga"-Brian.

Abam menilai respons kampus cenderung refleksif dan represif: karya dihapus, pelaku dicari, teguran diberikan, dan aturan tambahan dibuat. Reaksi cepat dapat menekan karya tertentu, tetapi juga mendorong pelaku mencari lokasi baru, waktu yang lebih aman, dan simbol yang lebih sulit diawasi. Dengan kata lain, pembatasan tidak menghilangkan perlawanan, melainkan mengubah tekniknya.

"Reaksi pihak kampus sama grafiti ini biasanya refleksif dan represifki. Kayak begitumi, langsung nahapus, trus nakasi teguran atau peraturan tambahan, nacariki juga pelakunya"-Abam.

Meskipun menyadari risiko, mahasiswa tetap berharap grafiti memantik perubahan. Pesan di dinding dimaksudkan untuk membuka perhatian, mengundang pembicaraan, dan menunjukkan bahwa mereka tidak diam terhadap kebijakan yang dianggap mengekang. Temuan ini menegaskan bahwa respons institusi yang konstruktif perlu membedakan antara penanganan kerusakan fasilitas dan pembacaan terhadap substansi kritik mahasiswa.

Dinamika Sosial dan Solidaritas Mahasiswa dalam Pembuatan Grafiti

Pembuatan grafiti membentuk hubungan sosial karena mahasiswa berbagi keresahan, pengetahuan teknis, lokasi, dan risiko. Tidak semua pelaku tergabung dalam komunitas formal; sebagian bekerja sendiri, sementara yang lain bergerak melalui kelompok kecil. Meskipun bentuk keterlibatannya berbeda, mereka dipersatukan oleh kebutuhan menyampaikan kritik ketika ruang resmi dianggap tidak memadai. Grafiti menjadi penghubung antara ekspresi personal dan pengalaman kolektif.

1. Dinamika Sosial

Dinamika sosial berlangsung dalam jaringan yang lentur. Hubungan dibangun melalui pertemanan, kesamaan minat, dan kepercayaan untuk menjaga identitas. Rizky lebih sering bekerja sendiri, tetapi tetap merasa terhubung ketika melihat tulisan dari fakultas lain yang memuat keresahan serupa. Karya-karya tersebut seolah membentuk percakapan tanpa pertemuan langsung dan menunjukkan bahwa masalah tertentu dirasakan melampaui batas jurusan.

"Kalau saya pribadi nah, nda ada karena lebih kusuka kalau sendiri. Karena keinginan sendiri ji memang, mauka menulis sendiri memang di tembok. Cuma yah nda kudapatpi orang lain juga toh, waktu menggambarku juga di waktu-waktu tertentu pi, nda tiap hari dan kutekuni juga, jadi ya mungkin karena itu sih, lebih suka yang sendiri"-Rizky.

Pengalaman Rizky memperlihatkan bahwa tindakan individual tidak selalu menghasilkan makna individual. Setelah ditempatkan di ruang publik, grafiti dapat diakui sebagai bagian dari suara mahasiswa yang lebih luas. Pesan mengenai organisasi, biaya, atau kebijakan dibaca oleh orang lain dan dapat dilanjutkan melalui tulisan baru. Dengan demikian, dinding menjadi medium komunikasi yang menghubungkan individu yang tidak saling mengenal.

Luthfi menjelaskan bahwa hubungan antarpelaku jarang terlihat karena kerahasiaan harus dijaga. Namun, ketika sebuah karya dihapus, pembuat dapat meminta dukungan teman untuk menggambar ulang atau menambah pesan. Tindakan tersebut memperlihatkan solidaritas praktis: dukungan tidak harus diwujudkan melalui organisasi resmi, tetapi melalui respons terhadap ancaman yang sama.

"Sebenarnya kalau hubunganta antara sesama pelaku toh, jarangji sebenarnya untuk berinteraksi. Karena menjaga kerahasiaan juga. Biasa juga ini, pelaku utama yang buat tulisan itu pertama, dia merasa nda terima kenapa dihapus. Jadi itumi dia tanya teman-temannya, 'deh dihapuski coretanku'. Teman-temannya bantu coret dan lain sebagainya. Semakin banyak"-Luthfi.

Dalam teori Scott, jaringan informal seperti ini merupakan salah satu kekuatan everyday resistance. Ketiadaan struktur terbuka mengurangi kemungkinan seluruh jaringan dihentikan sekaligus. Pelaku dapat bergerak sendiri, saling meniru simbol, atau memberi dukungan tanpa mengetahui identitas semua orang yang terlibat. Solidaritas tumbuh dari pemahaman bersama mengenai risiko dan tujuan, bukan dari keanggotaan formal.

Komunikasi simbolik memungkinkan hubungan tersebut bertahan. Mahasiswa memahami arti tertentu dari kata, kode, atau gambar tanpa perlu koordinasi langsung. Kerahasiaan sekaligus menjadi norma sosial: pelaku saling melindungi karena terbukanya identitas dapat menimbulkan sanksi. Dalam

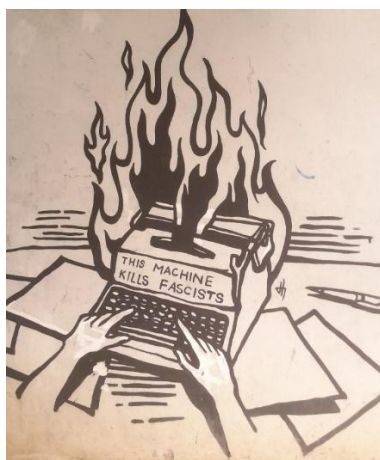
situasi ini, kepercayaan tidak selalu lahir dari kedekatan personal, tetapi dari kesadaran bahwa mereka menghadapi struktur kontrol yang sama.

Brian menyebut grafiti sebagai salah satu dari beragam metode yang dipilih kelompok mahasiswa untuk bergerak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa grafiti tidak berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan poster, musik, demonstrasi, diskusi, dan bentuk ekspresi lain. Pilihan medium disesuaikan dengan kemampuan, konteks, dan tingkat risiko.

“Kalau mau spesifik menjelaskan soal grafiti adakah hubungannya dengan mahasiswa ya menurutku, sependek pengetahuanku hanya bentuk keberagaman metode yang dipikirkan sama kelompok mahasiswa yang mau bergerak”-Brian.

Grafiti juga dapat dijelaskan melalui interaksionisme simbolik karena tindakan pembuat dan pembaca bergantung pada makna yang diberikan terhadap simbol. Tulisan yang bagi kampus dianggap pelanggaran dapat bagi mahasiswa berarti kritik, keberanian, atau solidaritas. Makna bersama memungkinkan karya individual menjadi bagian dari strategi kolektif, walaupun tidak ada hubungan personal yang kuat antara semua pelaku.

Latar belakang akademik memengaruhi pembagian peran. Abam menjelaskan bahwa mahasiswa seni cenderung dominan pada komposisi gambar, warna, dan teknik, sedangkan mahasiswa sosial-humaniora lebih banyak menyusun pesan, simbol, dan narasi. Perbedaan ini tidak bersifat mutlak, tetapi menunjukkan bahwa kolaborasi dapat menggabungkan kemampuan visual dengan analisis isu.



Gambar 9. Grafiti ‘This Machine Kills Fascists’ oleh mahasiswa seni UMI

Sumber: Dokumentasi Penulis

“Iya, biasanya ada perbedaan, entah itu dari cara mereka terlibat maupun dari intensitas dan perspektifnya. Kalau anak seni itu biasa lebih dominanki dalam urusan teknis kayak komposisi gambar dan warna. Kalau anak sosial atau

humaniora itu biasanya lebih kuatki dalam menyusun pesan, simbol, atau narasi yang mau disampaikan”-Abam.

Gambar 9 dan Gambar 10 memperlihatkan pertemuan antara aspek estetis dan pesan politik. Tulisan “This Machine Kills Fascists” menampilkan rujukan simbolik yang kuat, sedangkan “#UMI MAHAL” menggunakan kalimat singkat untuk mengkritik biaya pendidikan. Keduanya menunjukkan bahwa efektivitas grafiti tidak hanya bergantung pada keindahan visual, tetapi juga pada kemampuan memilih bahasa yang sesuai dengan audiens dan ruang.



Gambar 10. Grafiti “#UMI MAHAL” di dinding kampus UMI

Sumber: Dokumentasi Penulis

Andi menilai kesamaan minat dan tujuan dapat mendorong mahasiswa berkolektif atau berkolaborasi. Hubungan itu tumbuh ketika mereka berbagi ide, pengalaman, dan ruang kerja. Melalui interaksi tersebut, identitas kelompok terbentuk secara dinamis berdasarkan makna yang diberikan pada tindakan bersama. Grafiti menjadi praktik yang mempertemukan kreativitas, kritik, dan kebutuhan akan dukungan sosial (Tahara, 2010).

“Tentu pasti ada, contoh bagi orang-orang yang memiliki minat yang sama untuk melakukan hal itu, tentu bakal berkolektif atau berkolaborasi dalam melakukan hal itu secara bersama. Pasti ada”-Andi.

Kolektif grafiti dengan demikian tidak selalu berbentuk organisasi tetap. Ia dapat muncul sementara untuk menyelesaikan karya, merespons penghapusan, atau menyuarakan isu tertentu. Fleksibilitas tersebut memungkinkan mahasiswa dari berbagai fakultas berpartisipasi sesuai kemampuan. Kesamaan tujuan menjaga hubungan meskipun intensitas keterlibatan dan cara kerja berbeda.

Dinamika sosial ini menunjukkan bahwa grafiti merupakan bagian dari budaya aktivisme kampus. Ia menghubungkan mahasiswa melalui pengalaman ketidakadilan, mempertemukan keterampilan yang berbeda, dan menciptakan ruang berbagi di luar institusi formal. Namun, jaringan tersebut tetap rapuh karena bergantung pada kepercayaan serta menghadapi ancaman pengawasan dan sanksi.

2. Solidaritas

Solidaritas dalam praktik grafiti terbentuk melalui pengakuan bahwa pelaku menghadapi risiko dan keresahan yang sama. Mereka berbagi informasi, membantu proses teknis, menjaga identitas, atau membuat karya baru ketika pesan sebelumnya dihapus. Grafiti menjadi ruang kolaborasi yang memperkuat rasa kebersamaan, meskipun para pelaku tidak selalu bertemu atau tergabung dalam komunitas resmi.

Rizky, yang lebih nyaman bekerja sendiri, tetap merasakan hubungan dengan mahasiswa lain melalui karya yang ditemuinya di fakultas berbeda. Pesan yang mewakili pengalaman serupa membuatnya mengetahui bahwa keresahan terhadap kebijakan tidak hanya dirasakan di lingkungannya. Grafiti berfungsi sebagai percakapan diam-diam yang melintasi batas fakultas.

"Ada iya menurutku, ini grafiti, kan biasa lewat-lewatka di fakultas lain, jadi ku tahumi juga apa yang dirasakan di fakultas sebelah. Berarti ini yang dia gambar itu juga yang ku rasa begitu, jadi bisa saja apa yang na gambar di fakultas lain tidak ku gambar di fakultas ku. Secara tidak langsung nah, tanpa ketemu apa yang dia rasakan di sebelah (fakultas lain) entah siapa yang gambarkin ini, sebagai media komunikasi ki juga sih"-Rizky.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa solidaritas dapat dibangun melalui komunikasi tidak langsung. Simbol dan tulisan menjadi alat berbagi makna; pembaca yang mengalami persoalan serupa dapat merasa diwakili tanpa mengetahui pembuatnya. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, kesamaan penafsiran mengubah grafiti menjadi pengikat sosial dan memperluas rasa senasib di antara mahasiswa (Derung, 2017).

Luthfi menjelaskan bahwa penghapusan karya sering mendorong teman-teman pelaku membantu membuat coretan baru. Respons bersama ini bukan hanya mengganti gambar yang hilang, tetapi menyatakan bahwa penghilangan satu pesan tidak otomatis mengakhiri kritik. Tindakan kolektif memperkuat motivasi dan membuat perlawanan semakin terlihat (Aulia et al., 2023).

"Sebenarnya bisa, memperkuat solidaritasnya toh. Biasa ini, pelaku utama yang buat tulisan itu pertama, dia merasa nda terima kenapa dihapus. Jadi itumi dia tanya teman-temannya, deh dihapuski coretanku. Teman-temannya bantu coret dan lain sebagainya. Semakin banyak"-Luthfi

Abam menekankan bahwa hubungan antarpelaku dibangun di atas rasa percaya karena mereka bergerak di ruang penuh risiko. Dukungan dapat berbentuk penjagaan saat pembuatan, penyediaan alat, perlindungan identitas, atau keberanian mengulang pesan. Solidaritas semacam ini memiliki fungsi emosional dan praktis: pelaku merasa tidak sendiri sekaligus memiliki sumber

daya untuk terus berkarya.

“Hubungan antar mahasiswa yang terlibat dalam grafiti itu biasanya eratki dan bisa dibilang dibangunki di atas rasa solidaritas yang kuat, karena mereka bergerak di ruang yang penuh risiko dan butuh saling percaya”-Abam.

Dalam kultur grafiti, identitas dan tanda kelompok juga dapat memperkuat ikatan. Karya menjadi bukti keberadaan serta sarana saling mengenali di ruang publik. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas mahasiswa tidak selalu bergantung pada nama komunitas; ia dapat tumbuh dari isu yang sama, simbol yang dipahami bersama, dan pengalaman menghadapi respons institusi.

Dinamika sosial dan solidaritas tersebut menegaskan bahwa grafiti bukan hanya hasil kreativitas individual. Ia merupakan medium komunikasi yang membangun hubungan, mengubah keresahan pribadi menjadi suara kolektif, dan mempertahankan kritik ketika forum resmi tidak dianggap memadai. Melalui jaringan informal, mahasiswa saling mendukung, berbagi risiko, serta menegaskan hak untuk hadir dan berbicara di ruang kampus. Grafiti akhirnya berfungsi sekaligus sebagai karya visual, arsip ketidakpuasan, dan praktik perlawanan sehari-hari terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan grafiti perlu dibaca sebagai umpan balik terhadap tata kelola kampus. Penghapusan karya mungkin memulihkan tampilan fisik dinding, tetapi tidak serta-merta menghapus persoalan biaya pendidikan, pembatasan kegiatan, kekerasan, atau minimnya transparansi yang melahirkan pesan tersebut. Karena itu, dialog yang terbuka, mekanisme pengaduan yang dipercaya, dan penyediaan ruang ekspresi dapat mengurangi konflik antara pemeliharaan fasilitas dan kebebasan berpendapat. Bagi mahasiswa, pengakuan terhadap substansi kritik lebih penting daripada penerimaan tanpa batas terhadap semua tindakan grafiti. Bagi institusi, membaca pesan sebelum memberikan sanksi dapat menjadi langkah awal untuk mengubah ketegangan simbolik menjadi evaluasi kebijakan yang lebih partisipatif dan bertanggung jawab secara berkelanjutan.

Referensi

- Aco, P. W. (2024). Gerakan Subkultur oleh Komunitas Pojok Street art Bali. *Invensi*, 9(2), 189-207.
- Alim, T. F., Wahjuwibowo, I. S., Paramayuga, D., Gautama, R., & Mores, H. (2024). Pembuatan Lukisan Mural Dan Signage Di Saung Cisadane Kampung Ekowisata Keranggan. *Juan (Jurnal Ultima Abdimas Nusantara)*, 1(1), 30-39.
- Arsat, M., Arifin, A., Lampe, M., & Tahara, T. (2022). Nelayan Bajo Melawan

- Hegemoni Kapitalis di Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 11(3), 447-459.
- Candra, N. M. T., Nugroho, W. B., & Punia, I. N. (2017). Produksi ruang sosial melalui mural di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi (Sorot)*, 1(1), 1-13.
- Dewi, C. I. D. L. (2022). Karya Mural: Kebebasan Berekspresi Seniman Jalanan yang Dilindungi Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 16(1), 14-21.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding public policy*. (No Title).
- I Ketut, A. W., & I Ketut, J. W. (2011). Seni Mural Sebagai Media Penyampaian Aspirasi Rakyat: Sebuah Kajian Politik Identitas. *RUPA Jurnal Ilmiah Seni Rupa*, 10(1), 56-74.
- Idham, I. (2019). Hegemoni Dan Resistensi Masyarakat Bima (Sebuah Kajian Poskolonialisme Sastra). *Literasi: Jurnal Penelitian, Pendidikan Bahasa, dan Sastra*, 1(01), 41-54.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Indriyati, R. F. (2011). *Kuasa Kata Grafiti Jogja Studi tentang Grafiti sebagai Media Komunikasi Politik Sehari-hari Versi Grafiter yang Terkromonisasi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Maknuni, J. (2021). Seni Mural Media Komunikasi Politik Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), 90-100.
- Masnah, M. (2020). Konsep Diri Artis Street art dalam Menghasilkan Mural "Kritik Sosial" di Jakarta. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 82-103.
- Minanto, A. (2017). Dinding dan Wajah Petani Ikonisitas Petani dalam Geneng Street art Project. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 155-175.
- Muttaqin, K. Resistensi Terhadap Hegemoni Dan Dominasi Dalam Pasung Jiwa Karya Okky Madasari.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*.
- Pramana, G. I., & Irfansyah, A. (2019). *Street art sebagai komunikasi politik: Seni, protes, dan memori politik*. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 1(2), 98.
- Puspita, D. B. P. (2024). *The Role of Graffiti as an Expression of Youth*

- Identity:(Case Study on ROCE and BKRE Bombers). *Commsphere: Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 2(II), 149-165.
- Putra, R., Munir, A., & Sobri, S. (2024). Graffiti Satire Oleh Street Artist Di Kota Padang. *JIABIS: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis dan Sosial*, 2(1), 98-109.
- Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. yale university Press.
- Sukeni, N. N. (2009). Hegemoni negara dan resistensi perempuan dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Bali. (No Title).
- Tahara, T. (2010). Reproduksi Stereotipe dan Resistensi Orang Katobengke dalam Struktur Masyarakat Buton. *Masyarakat Indonesia*, 36(2), 183-207.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*.
- Wanis, R. A., Tiyas, Y. H., & Aulia, D. S. (2023). Graffiti Sebagai Media Ekspresi Seni Anak Muda. *Batarirupa: Jurnal Pendidikan Seni*, 3(1), 21-30..2827
- Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*, Cet. Ke-1, Jakarta: Intermedia.
- Wijaya, H. (2018). Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi). *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, 3(1), 1-10.
- Wulandari, P. E., & Rahmat, A. M. (2021). Media Graffiti Sebagai Bentuk Komunikasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah LISKI (Lingkar Studi Komunikasi)*, 7(1), 12-22.
- Yendra, Y., Artawa, K., Suparwa, I. N., & Satyawati, M. S. (2020). Symbolic functions of graffiti in Padang City of Indonesia: Critical linguistic landscape studies. *Jurnal arbitrer*, 7(1), 100-108.